

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan keindahan alam yang sangat menarik untuk di kembangkan. Keragaman budaya ini dilatarbelakangi oleh adanya agama, adat istiadat yang unik dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Potensi tersebut merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui pengembangan kepariwisataan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Negara Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang besar serta memberikan modal besar bagi sektor pariwisata. Parawisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dengan potensi wisata alam dan budaya yang begitu besar, pariwisata Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar bagi perekonomian Indonesia<sup>1</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa maksud dari kepariwisataan ialah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan

---

<sup>1</sup><http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/pariwisata> diakses pada tanggal 8 oktober 2017, pukul 19.25 WIB.

terhadap nilai – nilai agama budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, sedangkan tujuan dari kepariwisataan ialah pemabangunan kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.<sup>2</sup> Dimana Perkembangan yang terjadi saat ini, pada dunia kepariwisataan menunjukkan *trend* yang positif sehingga menimbulkan rasa optimis yang dalam bagi mereka yang bergerak disektor pariwisata dengan ditunjang oleh perkembangan teknologi yang modern dibidang komunikasi dan transportasi.

Sektor pariwisata memiliki dampak positif untuk masyarakat dari sudut sosial, dimana kegiatan pariwisata akan memperluas kesempatan tenaga kerja baik dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun dari berbagai sektor usaha yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kepariwisataan. Hubungan dengan kegiatan para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya wisatawan dalam negeri akan dapat menumbuhkan dan meningkatkan pegenalan dan cinta terhadap tanah airnya, sehingga dapat memotivasi sikap toleransi dalam pergaulan yang merupakan kekuatan dalam pembangunan bangsa. Selain itu juga, pariwisata mampu memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai – nilai kehidupan.

Yogyakarta merupakan Provinsi yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata, sebagai kota wisata, Yogyakarta dikenal mempunyai banyak objek dan daya tarik wisata serta potensi wisata yang beraneka ragam. Yogyakarta dibagi

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataaan

menjadi lima wilayah administratif, Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Guning kidul. Masing – masing wilayah administratif tersebut memiliki kekayaan wisata yang sayang jika tidak menjadi pusat perhatian dan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatwan mancanegara. Keistimewaan dan daya tarik dari suatu objek atau tempat wisata bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun asing setiap tahunnya, tidak hanya daya tarik yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, namun juga dari fasilitas yang tersedia dan keramahan penduduk sekitar objek wisata serta di dukung oleh pemerintahan daerah setempat. Semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan ke objek – objek wisata di Yogyakarta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana dari pendapatan tersebut nantinya digunakan pula untuk mendukung pembangunan di sektor – sektor yang lain. Ada banyak ragam jenis wisata di Yogyakarta, bisa berupa wisata alam dan wisata budaya, wisata alam adalah wisata yag terbentuk secara alami dan betul – betul dijaga kelestariannya dan kealamiannya oleh masyarakat, wisata alam dapat memperlihatkan sisi eksotisnya dari segi kenampakan fisiknya maupun dari segi perawatan dan pelestariaanya. Sedangkan wisata budaya dapat memperlihatkan sisi eksotisnya dari segi pelestarian budaya di suatu tempat atau daerah, misalnya ciri khas kehidupan sosial masyrakat desa, upacara adat, kesenian lokal, benda – benda peninggalan sejarah ataupun peninggalan purbakala, kegiatan keagamaan, acara ritual, bahasa daerah yang khas dan lain sebagiannya.

Banyak sekali daerah – daerah yang memiliki potensi pariwisata yang menarik, salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Kabupaten Kulon Progo memiliki destinasi wisata yang terdiri dari wisata Alam, kerajinan, adat dan tradisi, wisata minat khusus, wisata pendidikan, wisata Relegi dan wisata kuliner. Salah satu contoh yang saat ini menjadi daya tarik pengunjung adalah wisata alam, dimana daerah Kulon Progo sebagian besar dikelilingi oleh daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Adapun destinasinya terdiri dari 32 wisata alam yaitu : Wisata Alam Kali biru, Hutan Mangrove, Air Terjun Perawan, Waduk mini Kleco, Goa Sriti, Gunung Ijo, Air Terjun Grujugan Sewu, Air Terjun Kedung Pedut, Pantai Bugel, Bukit Isis, Desa Wisata Nglingo, Air Terjung Setawinbg, Taman Sungai Mudal, Pantai Pasir Kadilanga, Embung Banjaroya, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Bukit Menoreh, Puncak Widosari, Puncak Dipowono, Wildlife rescue centre Jogja, Puncak Gunung Lanang, Air terjun Kembang Soka, Gunung Kukusan, Taman bambu air Waduk Sermo, Pesona Bukit Cendana, Air terjun kedung ingas, Kedung Bendo, Pule Payung dan Pantai Glagah.

Dari sekian banyak potensi objek wisata yang sedang berkembang di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya objek wisata alam Canting Emas Puncak Dipowono yang berada diantara perbukitan Menoreh dengan ketinggian 600 MDPL, terletak di dusun Clapar II, Desa Hargowilis menampilkan pesona keindahan alam, hamparan perbukitan hijau dan waduk sermo nampak terlihat dari puncak tersebut. Vegetasi dominan berupa pepohonan Jati, Pinus, dan kayu putih turut menambah

keindahan pemandangan di sekeliling obyek wisata. Canting Mas Puncak Dipowono merupakan wisata alam yang tergabung dalam kawasan wisata terpadu Hutan Kemasyarakatan ( HKM ) Kabupaten Kulon Progo dan dikelola oleh beberapa kelompok Tani Hutan kemasyarakatan yang ada diwilayah tersebut. secara keseluruhan, terdapat tujuh kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKM) yang ada di Kabupaten kulon Progo dan salah satunya adalah KTHkm Sido Akur yang turut mengelola objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono. Status kawasan berupa Hutan Lindung (HL) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan mandiri selama 35 tahun diberikan izin pemanfaatan Hutan Kemasayarakatan. Dengan adanya izin tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat Lokal untuk memnfaatkan jasa lingkungan dengan melakukan pengembangan objek wisata alam.

Awal mula terbentuk nya objek wisata Canting mas Puncak dipowono, di awali dengan pemikrian Kelompok Tani Hutan Kemasyrakatan Sido Akur. Di lihat dari 2,5 hektar kawasan lahan tanah yang dikelola memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan salah satu destinasi objek wisata alam. Harapan dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah sekitar tersebut.

Dalam proses pengembangan objek wisata Canting Mas Puncak Dipwono sudah terdapat fasilitas penunjang seperti : Mushola, kamar mandi, spot foto, gazebo, area *parkir* dan kios – kios jualan. Terletak di kawasan Perbukitan Menoreh objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono berdeketan dengan objek wisata Kali Biru yang saat ini sedang populer dikalangan wisatawan. Objek wisata

ini juga dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang berkerjasama dengan Pihak LSM yang merupakan mitra dari Ford Foundation dan Sigro Adventure. Desa wisata Kali Biru secara rutin telah menjadi tempat studi banding kelompok tani berbasis kehutanan dari seluruh wilayah Indonesia. Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang menggarap lahan 29 hektar ini di nilai sukses membuat objek wisata. Dengan mengelolah wisata tersebut para petani kini tidak hanya mengadakan pendapatan dari sektor pertanian saja, tapi juga meraih *income* dari pengelolaan tempat wisata tersebut. Mereka mendapatkan hasil dari tiket yang dijual serta jasa fasilitas lainnya. Para pengunjung yang datang di tempat ini, hanya dikenakan biaya tiket masuk Rp. 3000 di tambah asuransi Rp. 2000 sementara untuk biaya *parkir*, sepeda motor Rp. 2000 dan mobil Rp. 5000. Objek wisata ini tidak hanya menawarkan keindahan alam berupa Waduk Sermo dan Pantai Selatan dari puncak ketinggian, tapi juga menawarkan wahana lain yang tak kalah menarik. Berbagai paket wisata mulai dari permainan *flying fox*, *trekking*, berfoto diatas pohon, *outbound* dan pelatihan. Objek Wisata Kali Biru juga menyediakan paket menginap di *cottage* dan *homestay*. Perbandingan antara Objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono dan objek Wisata Kali Biru. Dapat dilihat dari sistem pengelolaan dan fasilitas yang di tawarkan.

Semenjak diresmikan Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 saat ini, Objek wisata Canting Mas” Puncak Dipowono” tidak mengalami peningkatan dalam hal kunjungan wisata dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.1**

Data Jumlah Pengunjung Objek Wisata CantingMas“Puncak Dipowono”

TAHUN 2015 – ( 2017 - Oktober )

NO	Nama Objek Wisata	Total jumlah pengunjung pertahun		
		2015	2016	2017- Oktober
1	Canting Mas Puncak Dipowono	2.394 jiwa	2.010 jiwa	9.70 jiwa

**Sumber : KTHKm Sido Akur / Pengelola Objek Wisata Canting Mas  
Puncak Dipowono**

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas jumlah pengunjung menurut data dari Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sido Akur / Pengelola Objek Wisata Canting Mas Puncak Dipowono Desa Clapar, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo. Pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan, jumlah Wisatawan yang berkunjung pada tahun 2015 berjumlah 2.394 jiwa kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 berjumlah 2.010 jiwa dan pada akhir tahun 2017 terjadi penurunan kembali dengan jumlah 970 jiwa. Permasalahan yang terjadi di objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono mulai dari tahun 2016 – 2017 mengalami fase penurunan kunjungan wisata, dengan terkendala Sumber Daya Manusia dalam hal pengelolaan. Minimnya antusias warga lokal untuk bekerja di objek wisata tersebut, sehingga menjadi kurang optimal dalam aktifitas pengelolaan objek wisata, Kemudian tidak didukung oleh infrastruktur salah satunya akses jalan menuju lokasi. Dimana dalam kepariwisataan Sumber Daya Manusia

menjadi salah satu faktor untuk menunjang infrastruktur, promosi dan konektivitas. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan pemasaran di bidang wisata adalah Dinas Pariwisata. Yang dimana peneliti ingin melihat bagaimana peran dari dinas Pariwisata dalam pengembangan potensi objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten Kulon Progo.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah terdiri dari :

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata terhadap pengembangan dari potensi Canting Mas Puncak Dipowono yang ada di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apa saja yang di lakukan Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Canting Mas Puncak Dipowono ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan Canting Mas Puncak Dipowono

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan objek wisata Canting Emas Puncak Dipowono. Oleh karena itu, kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang kajian Ilmu Pemerintah tentang peran dinas pariwisata terhadap pengembangan objek wisata

#### **1.4.2. Manfaat Paraktis**

##### **1.4.2.1. Bagi peneliti**

1. Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan selama mendalami perkuliahan.
2. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yoyakarta.
3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kulon Progo.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dan pemicu bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kulon Progo dalam Perannya mengembangkan sektor wisata.

##### **1.4.2.2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan pengelolaan objek wisata Canting Emas Puncak Dipowono.

### **1.5. Penelitian Terdahulu**

1. Upaya pengembangan pantai teluk penyu sebagai obyek wisata unggulan di Kabupaten Cilacap, di susun oleh Nindya Eka dan Suparmini, M.si. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sumber daya alami yang dimiliki pantai teluk penyu yaitu panorama laut dan pemandangan nusakambangan. 2) Potensi sosial pantai teluk penyu berupa : kehidupan nelayan tradisional, tempat pelelangan ikan, kerajinan karang, kapal – kapal tengker, perahu – perahu nelayan tradisional, dan tegarnya kilang pertamina. 3) potensi budaya pantai teluk penyu berupa : Sedekah Laut dan Perahu Naga. 4) Rencana program yang sudah dapat terlealisasi adalah penataan kios dengan pembangunan cafetaria. 5) Dinas Pariwisata berupaya menambah sarana dan prasarana dalam hal pendidikan dengan membangun gedung IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ). 6) Hambatan pengembangan objek wisata berupa : dana anggaran yang tidak mencukupi, tanah milik TNI AD, terdapat jalur pipa pertamina, sulit nya mengatur masyarakat, masih kurangnya rasa memiliki dari masyarakat, tingkat SDM yang rendah dan kurangnya dukungan untuk bekerjasama mengembangkan Pantai Teluk Penyu. 7) Solusi untuk mengatasi hambatan seperti : Melakukan usulan pengajuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, sosialisai dan pengarahan tentang pengembangan Pantai Teluk Penyu kepada masyarakat dan menjalin kerjasama setiap tahunnya dengan TNI AD sebagai pemilik lahan objek wisata. 8) kondisi objek wisata Petani Teluk Penyu sudah sesuai dengan kajian yang ada di RT RW. 9)

Kondisi objek wisata Pantai Teluk Penyus dapat dikatakan sesuai dengan RIPP, namun banyak beberapa program yang belum terlealisasi. 10) Kebijakan yang ditetapkan belum dapat dimanfaatkan pengelola secara maksimal.

2. Strategi pengembangan pariwisata pantai pangandaran di Kabupaten Pangandaran, disusun oleh Kahirunisa Asfari Nurfadilah Universitas Lampung. Pengembangan industri kepariwisataan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan wilayah daerah sekitar objek wisata. Sama halnya dengan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, sektor pariwisata bertindak sebagai sektor utama, yaitu sektor unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. Penelitian ini dilakukan di objek wisata Pantai Pangandaran serta instansi terkait yaitu Dinas pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan *stakeholders* terkait. Tujuan peneliti ini untuk menjelaskan kemanfaatan pariwisata dengan gambaran strategi pengembangan pariwisata pantai pangandaran yang berbasis masyarakat atau komunitas. Hasil penelitian terdapat empat faktor yang menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan pariwisata Pantai Pangandaran. Keempat faktor tersebut adalah kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dengan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata yang kebermanfaatannya kegiatan pariwisata sebesar – besarnya diperuntukan bagi masyarakat, kesimpulan penelitian ini berdasarkan analisis ke empat faktor tersebut dihasilkan 4 strategi yaitu strategi SO,

strategi ST dan strategi WT dengan strategi prioritas adalah strategi SO dan strategi WO. Peneliti menggunakan Teknik Analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunities, Theths*)<sup>3</sup>

3. Pengembangan objek wisata Sanggulari *Park* sebagai wisata Edukasi di Kabupaten Purbalingga, disusun oleh Puji Lestari Universitas Negeri Surakarta. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk menganalisa potensi dan menentukan startegi pengembangan Sanggulari *Park* yang terletak di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanggulari *Park* memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu aset wisata di Kabupaten Purbalingga. Sanggulari *Park* memiliki potensi yang ada dan wisata untuk menarik wisatwan yang berkunjung, untuk dapat bersaing dengan dengan daerah tujuan wisata lainnya yang berada di Kabupaten Purbalingga. Sanggulari *Park* masih snagat memerlukan pengembangan yang optimal. Sedangkan kendala yang dihadapi Sanggulari *Park* adalah kurangnya sumber daya manusia yang handal, wahana fasilitas yang rusak, sarana dan prasaran menuju lokasi Sanggulari *Park*. Strategi pengembangan untuk meningkatkan kunjungan wisatwan adalah segmentasi yang sudah terpilah, pembuatan paket wisata Sanggulari *Park* – Owabong. Memperbaiki wahana dan fasilitas yang rusak, mempublikasikan potensi Sanggulari *Park* kepada masyarakat disediakan

---

<sup>3</sup><http://digilib.unila.ac.id/27562/3> di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 23.35 WIB

shuttle menuju objek dan serta memberikan pengetahuan tentang pengelolaan kepada masyarakat sekitar<sup>4</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian tersebut dilakukan di daerah pesisir dan merupakan wisata edukasi. Penelitian-penelitian tersebut berfokus kepada strategi pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Canting Mas Puncak Dipowono Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini berbeda dengan peneliti – peneliti sebelumnya karena lebih berfokus kepada upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kulonprogo khususnya objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono dan dibantu oleh beberapa kelompok tani hutan kemasyarakatan yang ada di wilayah sekitaran Canting Mas Puncak Dipowono karena awal mula terbentuknya objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono adalah dari pemikiran Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sido Akur.

---

<sup>4</sup> [pdfhttps://digilip.uns.ac.id/dokumen/detail/43832/Pengembangan-objek-wisata-Sanggulari-Park-sebagai-wisata-Edukasi-di-Kabupaten-Purbalingga](https://digilip.uns.ac.id/dokumen/detail/43832/Pengembangan-objek-wisata-Sanggulari-Park-sebagai-wisata-Edukasi-di-Kabupaten-Purbalingga) di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 23.04 WIB

## **1.6. Kerangka Teori**

Kerangka dasar teori adalah teori – teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Sebelum penulis mengemukakan teori –teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, ada baiknya penelusi mengemukakan definisi terlebih dahulu menurut Singarimbun : “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan reposisi untuk menerangkan suatu fenomena alam yang menjadi pusat perhatian. Dilihat dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teori merupakan sara pokok yang menyatakan hubungan yang sistematis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti. Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah hal – hal sebagai berikut :

### **1.6.1. Peran Pemerintah**

#### **1.6.1.1. Peranan**

Berbicara mengenai peranan, hal ini berkaitan dengan seorang individu, Lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam kamus bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian tugas utama yang dilaksanakan.<sup>5</sup> Peranan adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Peran atau peranan dapat juga diartikan suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan

---

<sup>5</sup> Tim penyusunan Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 667.

yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok dengan yang lebih besar dalam suatu peristiwa. Beberapa pengertian peranan diantaranya :

Menurut WJS. Purworaminto.<sup>6</sup> Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama (Terjadinya suatu hal atau peristiwa). Sedangkan menurut Astrid S. Susanto.<sup>7</sup> Peranan adalah meliputi bagian – bagian yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seorang dalam masyarakat, Peranannya dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.<sup>8</sup>

#### **1.6.1.2. Peran pemerintah**

Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dalam mengembangkan pelaksanaan semua tugas – tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan. Peran pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan – kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>6</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hal 735

<sup>7</sup> Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, Hal 95.

<sup>9</sup> Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration And Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-11

Fungsi dasar pemerintah menurut Anerson seperti yang dikutip oleh Sri Mulyani yaitu :<sup>9</sup>

1. Menyediakan infrastruktur.
2. Menyediakan barang – barang dan jasa publik.
3. Menyelesaikan konflik – konflik antar kelompok.
4. Menumbuhkan dan memelihara kompetisi.
5. Menjaga kelestarian sumberdaya
6. Menjaga agar setiap warga Negara memiliki atau mempergunakan barang dan jasa publik taraf minimal yang dibutuhkan.
7. Menjaga stabilitas ekonomi.

Dari beberapa fungsi diatas, paling tidak ada tiga fungsi peran yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu :<sup>10</sup>

- **Fungsi pengaturan ( *Regulasi* )**

Merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten / Kota. Fungsi *regulasi* atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang – undangan.

---

<sup>9</sup> Sri Mulyani. *Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pelayanan Publik Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap*, Fisip UMY, Yogyakarta, 2001, hal 8.

<sup>10</sup> Owen E. Hughes, *Public Manajemen And Administration And Introduction*, Martin Press, London, 1994, hal 88-11

Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan oleh lembaga – lembaga pemerintah baik lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif juga lembaga Departemen maupun non.

Departemen. Peraturan – peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen – komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

- **Fungsi Pemberdayaan ( *Empoworment* )**

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan sebagainya.

Pada prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu. Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran politik, hukum ekonomi, dari aparat pemerintah perlu dimantapkan sehingga pemerintah bisa memperdayakan masyarakat, karena upaya pemberdayaan ini tidak terlepas dari aspek imitasi keteladanan dari aparat pemerintah sendiri.

- **Fungsi Pelayanan**

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak.

Hal ini karena eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan – kebijakan yang ditetapkan, baik dari birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah. Fungsi pelayanan merupakan peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

1. Menjamin keamanan Negara
2. Memelihara ketertiban
3. Menjamin penerapan keadilan
4. Pekerjaan umum dan pelayanan
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial
6. Menerapkan kebijakan ekonomi
7. Memelihara sumber daya lingkungan

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan pemerintah adalah sebagai satu lembaga yang dibentuk oleh Negara. Yang mempunyai peran tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Tugas – tugas tersebut baik berupa penyedia sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan didaerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

### **1.6.2. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Ketentuan tentang pemerintah diatur dalam Undang – Undang Otonomi Daerah No.23/2014. Berdasarkan Undang – Undang No. 23/2014 tentang pemerintah daerah tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal – hal yang mendasar dalam Undang – Undang No. 23/2014 adalah mendorong untuk memperdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran – peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. oleh karena itu UU No. 23/2014 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten daerah kota, yang dalam undang – undang No. 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai kabupaten Daerah tingkat II dan Kotamadya Daerah tingkat II. Daerah Kabupaten dan Daerah kota tersebut berkedudukan sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membantu dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat<sup>11</sup>

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang menyangkup kewenangan semua bidang Pemerintah, Kecuali kewenangan politik diluar Negeri,

---

<sup>11</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014*

Pertahanan Kemananan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan pada bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan Daerah.<sup>12</sup> Sedangkan Otonomi yang nyata adalah keleluasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab sesuai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada Daerah dalam.

1. Prinsip – prinsip penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah :

a) Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas Desentralisasi menurut undang-undang adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah<sup>13</sup> Sementara Deskonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap ditangan pemerintah pusat. Jadi Deskonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.

b) Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang di dasarkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

---

<sup>12</sup> Undang – Undang Otonomi Daerah 2004.11 Dedi Supradi B.Ph.D, Dadang Solihin, MA. Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1947.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber – sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Pelaksanaan otonomi berkaitan dengan adanya daerah otonom yang di pimpin oleh seorang kepala daerah yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan pada prinsip – prinsip demokrasi. Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pengaturan pada setiap undang – undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peranan yang strategis kepada kepala daerah, mengingat kepala daerah merupakan unsur penentu berkaitan pada keberhasilan pembangunan

---

<sup>14</sup> HAW Widjaja. *Penyelenggara Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada: 2013.hlm 7

nasional, karena pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau negara.<sup>15</sup>

Di dalam sebuah penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dituntut untuk dapat berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang telah dimiliki oleh daerah agar dapat menghasilkan sumber keuangan sendiri dan potensi di daerahnya tersebut termasuk didalam pengaplikasikan dalam wujud pengembangan yang nyata. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi wewenang Daerah<sup>16</sup>

#### **1.6.2.1. Dinas Daerah**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Dinas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian kebijakan dan pelaksanaan pelayanan umum

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. J. Kaloh. *Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Garfika. 2010. Hlm

<sup>16</sup> Joshep Riwu Kaho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pembangunan SDA Aparatur Pemda dan DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 21

<sup>17</sup> Peraturan pemerintah nomor 41

3. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.6.2.2. Organisasi Dinas**

Dinas terdiri dari 1 ( satu ) sekretariat dan paling banyak 4 ( empat ) Bidang, sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) subbagian dan masing – masing bidang terdiri dari paling banyak 3 ( tiga ) seksi Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 ( satu ) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

#### **1.6.3. Pariwisata**

Pengertian Pariwisata Menurut Suwanto ( 2004 ) Pariwisata adalah proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain atau diluar tempat tinggalnya, dengan dorongan kepergiannya adalah dengan berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu menambah pengalaman ataupun ingin belajar<sup>18</sup>

Menurut UU No. 9 Tentang Kepariwisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, objek – objek, daya tarik serta usaha yang lain terkait di bidang tersebut. Dengan demikian pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan – pekerjaan rutin, keluar tempat tinggalnya aktifitas yang dilakukan selama mereka tinggal yang dituju dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

---

<sup>18</sup>Suwanto, gamal : *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset Yogyakarta: hlm, 23

### **1.6.3.1. Dampak Pariwisata**

Dampak pariwisata dalam pembangunan mencakup beberapa segi yaitu :

#### **Segi Ekonomi**

Petters Bryden dalam (Soekadijo: 1997), merumuskan 5 hal dampak positif pengembangan pariwisata yang dijadikan tujuan pengembangan pariwisata sebagai berikut : 1) Menyumbang kepada neraca pembayaran, 2) Menyebarkan pembangunan kepada daerah-daerah non industri, 3) Menciptakan kesempatan kerja, 4) Dampak pada pembangunan ekonomi pada umumnya melalui dampak pengganda (multifier effect) dan 5) Ketertarikan sector pariwisata dengan sector lain dalam perekonomian. Dampak ekonomi dalam pembangunan pariwisata adalah dampak negative atau dampak positif yang terjadi terhadap lingkungan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha<sup>19</sup>

#### **Segi Sosial Budaya**

Dampak positif dan negative pembangunan pariwisata pada aspek budaya menurut Inskeep (1991: 72) adalah : (1) Conservation of Cultural Heritage (2) Renewal of Cultural Pride (3) Cross Cultural Exchange (4) Offer crowding and loss of amenities for residents, (5) Cultural Impacts (6) Social Problem.

---

<sup>19</sup>G.R, Soekadijo :AnatomiPariwisata (MemahamaiPariwisataSbeagaiSistem Linkage), PT GramediaPustaka Jakarta: hlm 25

## **1.7. Definisi konseptual**

Definisi konseptual adalah salah satu dari unsur penelitian penting dan dapat dipahami bahwa definisi konseptual merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian konsep dengan lain yang merupakan suatu abstraksi hal – hal yang diminati agar tidak terjadi kesalah pahaman, adapun definisi konseptual yang digunakan yaitu :

### **1. Peran**

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

### **2. Pemerintah daerah**

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Daerah ( DPRD ).

### **3. Dinas Daerah**

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **4. Dinas pariwisata**

Dinas pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan pengembangan pariwisata dan pemasaran wisata. Dinas pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

## **5. Pariwisata**

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi soaial, budaya, alam dan ilmu.

## **6. Wisata alam**

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada budidaya, sehingga memungkinkan wisatwan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhnkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

### **1.8. Definisi Oprasional**

Definisi opsional merupakan penjabaran dari suatu variable dalam indikator – indicator atau gejala-gejala yang terperinci, sehingga variable-variabel itu dapat diketahu iukurannya. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasioanl yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut.<sup>20</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah peran pemerintah yang meliputi:

#### **1. Peran pengaturan**

Memberikan penekanan bahwa peraturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat

---

<sup>20</sup>Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1995, hal 21.

kebijakan lebih dinamis dan mengatur kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

## 2. Peran pemberdayaan

Dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, sadar diri, dan mampu memilih alternative yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Dalam hal ini pemberdaaya kepada masyarakat dalam mengembangkan obyek wisata.

## 3. Peran pelayanan

Dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak memberatkan serta tidak pilih kasih dan semua orang memiliki hak sama yaitu hak dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagiannya dalam hal ini pelayanan terhadap wisatawan.

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif ( penggambaran ) yang berupa fakta – fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang – orang yang di cermati. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi ( Rakhmat, 2000: 24). Metode penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian ( seseorang, lembaga, masyarakat dan lain – lain ) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Menurut Jalaludin Rakhmat ( 2000: 25 ), Penelitian deskriptif bertujuan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.
3. Membantu perbandingan atau evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan kepengurusan pada waktu yang akan datang.

5. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk menggambarkan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

### **1.9.2. Lokasi penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo, yang beralamat di Jl. Sugiman No.12, pengasih wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Objek wisata Canting Mas Puncak Dipowono yang beralamat Jl. Clereng Tamanan KM.6, Desa Hargowilis, Kokap Kabupaten Kulon Progo.

### **1.9.3. Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik :

#### **1. Wawancara**

Interview atau wawancara merupakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui Tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yaitu dengan Kepala Bidang Pariwisata, pihak swasta dan masyarakat Desa Hargowilis, Kokap Kabupaten Kulonprogo yang akan diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan dan jawaban-jawaban narasumber dicatat ataupun direkam dengan alat perekam.

#### **2. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara mencatat dan mengambil sumber-sumber tertulis yang ada berupa laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung

lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

#### **1.9.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa Kualitatif, dimana data yang terkumpulkan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh data dari studi lapangan, yang kemudian dilakukan proses penganalisaan berdasarkan kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan fakta data-data untuk menghasilkan suatu teori. Secara umum, kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi.
- b) Mengedit data, peneliti memperbaiki kualitas data, seperti hasil wawancara dengan narasumber yang belum tersusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan akan kebenaran yang mungkin timbul setelah membaca data tersebut.
- c) Mengolah data merupakan suatu tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini, data diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran terkait dengan penerapan tahapan-tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon progo kepada masyarakat Desa Hargowilis..<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Wardiyanto, Metode Penelitian Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta. Tahun 2006, Hal 38.

